

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antara manajer dengan *stakeholder*. Apalagi saat ini belum ada media informasi lain yang dapat dipakai kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi bisnis. Manajer menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama mengoperasikan perusahaan.

Farid dan Siswanto mengemukakan bahwa **“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat *financial*”**.<sup>1</sup> Kamsir juga menyatakan **“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”**.<sup>2</sup> Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu.

Sementara disisi lain laporan keuangan dipakai oleh *stakeholder* untuk melihat, menilai, meminta pertanggungjawaban manajer atas apa yang telah dilakukan dan dialami manajer itu. Laporan keuangan juga dipakai *stakeholder*

---

<sup>1</sup> Irfan Fahmi, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Keenam: Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 2

<sup>2</sup> Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Kedelapan: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 7

untuk menentukan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan terkait dengan hubungan bisnisnya. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

*Statement of financial accounting concept* (SFAC) No. 1 dalam penelitian Anindyah mengemukakan bahwa “**Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen**”.<sup>3</sup> Dengan kecenderungan memperhatikan laba ini, disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur melalui informasi laba, yang mendorong timbulnya perilaku penyimpangan yaitu berupa manajemen laba.

Ada alasan mendasar mengapa manajer melakukan manajemen laba yang didasari oleh harga pasar saham suatu perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh laba, risiko, dan spekulasi. Oleh sebab itu, perusahaan yang labanya selalu mengalami kenaikan dari periode ke periode secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan lebih besar dibandingkan persentase kenaikan laba. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pengaturan laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko.

Secara logika hal itu bisa dipahami karena manusia merupakan pribadi yang cenderung menghindari risiko (*risk adverse*) yang selalu berusaha mengeliminasi atau meminimalkan kerugian yang mungkin akan dialaminya, walaupun upaya

---

<sup>3</sup> Anindyah Prastiti, **Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hal. 1

yang dilakukannya mungkin akan merugikan pihak lain. Kondisi inilah yang mengakibatkan sampai saat ini manajemen laba masih dipertanyakan apakah merupakan aktivitas yang melanggar prinsip akuntansi berterima umum atau bukan.

Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimalkan kesejahteraan para *stakeholders*, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak tersebut seringkali menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan atau agensi konflik. Konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. *Principal* berkepentingan memperoleh profitabilitas yang selalu meningkat sehingga dapat tercapai tingkat pengambilan saham yang maksimal. Agen berkepentingan memperoleh kompensasi kontrak yang maksimal agar tercapai kemakmurannya. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mancapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Hal ini akan mendorong agen untuk melakukan manajemen laba. Sutopo mengemukakan, dalam penelitian Anindyah bahwa, **“Manajemen laba dapat terjadi karena penyusunan *statement* keuangan menggunakan dasar akrual. Dasar akrual ini mempunyai implikasi bahwa laba akuntansi antara lain ditentukan oleh besaran akrual”**.

4

---

<sup>4</sup> Anindyah Prastiti, **Op.Cit**, hal. 2

Berbagai kasus manajemen laba terbukti telah mengakibatkan hancurnya tatanan ekonomi, etika, dan moral dimana masih ada perbedaan pandangan dan pemahaman terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Sampai saat ini masih ada kontroversi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Secara umum kontroversi ini terjadi antara praktisi dan akademisi yang pada dasarnya menyatakan apakah manajemen laba dapat dikategorikan sebagai kecurangan (fraud) atau tidak. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai kecurangan, sementara akademisi menilai manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan.

Semakin merebaknya aktivitas manajemen laba juga telah mendorong berkembangnya perhatian publik terhadap konsep *good corporate governance*. Konsep ini secara definitif diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk semua *stockholder* dan *stakeholdernya*. Ada dua point penting yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hal *stockholder* dan *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan secara akurat, tepat waktu dan transparan semua informasi mengenai perusahaan.

Atau dengan kata lain, konsep *good corporate governance* menekankan pentingnya kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas informasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Alasannya, karena laporan keuangan merupakan alat komunikasi utama perusahaan dengan semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Semakin berkualitas laporan

keuangan semakin berkualitas pula keputusan yang dibuat *stakeholder* yang menggunakan informasi itu.

Agar kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas yang tercakup dalam *good corporate governance* dapat berjalan secara efektif maka diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban untuk membentuk sistem pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab.

Pengawasan dan pengendalian ini dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai independensi dengan kepentingan manajer perusahaan. Seluruh tindakan dan keputusan yang dibuatnya harus lepas dari kepentingan manajer, apalagi jika hal itu menyangkut kepentingan *stakeholder*.

Untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit dan komisaris independen. Komite audit merupakan pihak yang mempunyai tugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Sedangkan komisaris independen merupakan pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk mendorong diterapkannya prinsip *good corporate governance* didalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai

tambah bagi perusahaan. Meski setiap pihak mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggungjawab.

Skandal pelaporan akuntansi sudah menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan karena tentang trik penyampain informasi keuangan, yang salah satunya adalah tindakan manajemen laba. Seperti kasus PT. Garuda Indonesia yang melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan tahun buku 2018, dimana PT. Garuda Indonesia mencatat piutang dari transaksi kerjasama dengan PT. Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan koneksi wifi dalam pesawat sebagai pendapatan dalam laporan keuangan tahun buku 2018. Keputusan tersebut menuai penolakan dari dua komisaris PT. Garuda Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (SAK).

Kasus PT. Garuda Indonesia ini menjadi alasan pentingnya untuk melihat bagaimana karakteristik dari dewan komisaris dan komite audit dalam mengurangi terjadinya praktik manajemen laba atau skandal pelaporan akuntansi yang akan dilihat dari ukuran, independensi, keahlian keuangan, dan frekuensi pertemuan dari dewan komisaris dan komite audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anindyah Prastiti (2013). Penulis mencoba mereplikasi penelitian Anindyah Prastiti dengan menggantinya menjadi penelitian dengan studi literatur dengan melakukan

perbandingan berdasarkan jurnal-jurnal dan buku-buku untuk dapat menarik kesimpulan.

Penelitian terdahulu mengenai karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba diantaranya sebagai berikut :

1. Desika Maharani (2011), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dari komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Sementara karakteristik komite audit yang lainnya (independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
2. Anindyah Prastiti dan Wahyu Meiranto (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan karakteristik-karakteristik lainnya (keahlian keuangan dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Erna Widiastuty (2016), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi komite audit, ukuran komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.
4. Kadek Trisna (2018), dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karakteristik komite audit yang diukur dengan ukuran komite audit,

personil komite audit yang memiliki keahlian akuntansi, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Studi Literatur Dampak Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Atas Manajemen Laba.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, saya menyusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak karakteristik dewan komisaris atas manajemen laba?
2. Bagaimana dampak karakteristik komite audit atas manajemen laba?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya susun, saya membuat tujuan penelitian sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak karakteristik dewan komisaris atas manajemen laba
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak karakteristik komite audit atas manajemen laba

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk memperluas wawasan mengenai karakteristik dewan komisaris dan komite audit, terutama pemahaman mengenai bagaimana dampak karakteristik dewan komisaris dan komite audit atas manajemen laba.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan informasi dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya terutama penelitian yang berkaitan dengan dampak karakteristik dewan komisaris dan komite audit atas manajemen laba.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berkontribusi dan menjadi referensi dalam pengembangan teori bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1. Teori Keagenan

Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta pengembangan sistem insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Untuk memahami *corporate governance*, jalan yang paling dekat adalah memahami teori agensi (*Agency theory*). Teori agensi ini memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*.

Adanan Silaban dan Berliana Lumban Gaol mengemukakan bahwa:

**“Teori keagenan didasarkan pada hubungan antara pemilik (*Principal*) dan manajemen (*Agent*). *Principal* melimpahkan kewenangan untuk mengelola perusahaan kepada agen. Secara legal, agen merupakan individu atau personel yang dipekerjakan untuk mewakili kepentingan pihak lain”.**<sup>5</sup>

Teori keagenan menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan dan manajer yang dimitigasi sebagian oleh laporan keuangan, yang merupakan salah satu cara agar pemilik perusahaan dapat mengawasi kontrak kerja dengan manajer mereka. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara kontrak antara *agent* dan *principal*, dimana pihak *agent* berkewajiban untuk melakukan tugas bagi kepentingan *principal*. Dalam hubungan keagenan semua pihak terdorong motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Konflik kepentingan antara manajemen selaku agen dan pemilik perusahaan sebagai *principal* sering kali terjadi dalam mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki oleh masing-masing pihak.

## **2.2. Good Corporate Governance**

*Organization for Economic Co-operation and Development dan Forum for Corporate in Indonesia* mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

---

<sup>5</sup> Adanan Silaban dan Berliana Lumban Gaol, **Teori Akuntansi Konsep Pelaporan Keuangan**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal. 41

H. Srisulistyanto, menyatakan **“*Good corporate governance* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholdernya*”**.<sup>6</sup>

Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan, dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama (*fainess*). Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (*transparancy*).

Sedangkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Artinya, perusahaan mempunyai tanggungjawab untuk menginformasikan semua apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu. Apa yang diinformasikan perusahaan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada sesuatu yang disembunyikan dari publik.

Terdapat benang merah antara satu definisi dengan definisi lainnya, dimana setiap definisi menekankan pentingnya keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggungjawab untuk setiap pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Ada harapan yang ingin diraih dengan menerapkan keempat prinsip secara

---

<sup>6</sup> H. Srisulistyanto, **Manajemen Laba Teori dan Model Empiris**, Cetakan Kedua: Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 131

konsisten, yaitu terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggungjawab.

### **2.2.1 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

#### 1. Transparan (*Transparency*)

Transparan merupakan salah satu konsep yang sangat penting, konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dengan menyediakan informasi secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dihubungkan dengan kemajuan teknologi membuat tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh *stakeholders*.

#### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Konsep akuntabilitas dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan. Setiap perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan dan memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada para *stakeholder*. Serta menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh para *stakeholder* terhadap hasil dari pencapaian perusahaan.

#### 3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Konsep pertanggungjawaban ini menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku seperti, masalah pajak, kesehatan dan

keselamatan kerja, hubungan industrial, serta menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Dengan kata lain perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab terhadap para *stakeholder* internal saja, tetapi juga bertanggungjawab kepada para *stakeholder* eksternal.

#### 4. Independensi (*Independency*)

Konsep independensi ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak timbul konflik kepentingan, dapat menciptakan kemandirian, dan tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Perusahaan juga harus menciptakan nilai-nilai untuk mampu menciptakan daya saing.

#### 5. Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Konsep kesetaraan dan kewajaran ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan sesuai dengan perilaku undang-undang yang berlaku. Prinsip kesetaraan ini diharapkan bisa mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan yang adil bagi pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan.

### **2.3. Dewan Komisaris**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris harus bersifat independen, juga tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan dituntut

mampu melaksanakan secara objektif, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan terhadap pihak lain.

Yayan Rama Kartin dan Aminar Sutra Dewi mengemukakan **“Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance* sesuai dengan aturan yang berlaku”**.<sup>7</sup>

FCGI mengatakan, Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Dewan Komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* yang dimana ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi yang telah dibuat oleh perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta memastikan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme yang mengawasi dan mekanisme yang memberikan petunjuk serta arahan pada para pengelola perusahaan.

Berikut tugas-tugas utama Dewan Komisaris dalam FCGI meliputi:

1. menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi, dan penjualan aset.

---

<sup>7</sup> Yayan Rama Kartin dan Aminar Sutra Dewi, **Karakteristik Dewan Komisaris dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan**, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2018, hal. 2

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah konflik kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalagunaan aset perusahaan dan memanipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitori pelaksanaan *good corporate governance*, dan melakukan perubahan yang dibutuhkan.
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

#### **2.4 Komite Audit**

Undang-undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 121 memungkinkan dewan komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini barang kali disebabkan oleh kecenderungan makin meningkatnya berbagai skandal penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris perusahaan besar baik yang terjadi di AS maupun Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan.

Sebagaimana dikatakan oleh Hasnati, dalam jurnal Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, tugas, tanggungjawab, dan wewenang komite audit adalah membantu Dewan komisaris, antara lain :

1. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai (prinsip tanggungjawab)
2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan (prinsip transparansi)
3. Mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal (prinsip akuntabilitas)
4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggungjawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit (prinsip tanggungjawab)<sup>8</sup>

Selanjutnya *forum for corporate governance in Indonesia* dan YPPMI *Institute* yang dirangkum dalam Sukrisno dan Ceni menyebutkan syarat-syarat menjadi anggota komite audit adalah :

1. Komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris.
2. Terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
3. Memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi.
5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan VIII.A.2. Tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal.

---

<sup>8</sup> Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Cetakan Pertama: Lembaga Kajian Pasar Modal, Jakarta, 2008, hal. 35

7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat komisaris.
8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan ifiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten.
11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.
12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite audit.

Aturan mengenai komite audit ini, antara lain dapat dilihat pada :

1. SE Ketua Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tentang komite audit untuk perusahaan publik.
2. Keputusan Direksi PT BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07/2004 tentang pencatatan saham dan efek.
3. Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-133/M-BUMN/1999.<sup>9</sup>

## 2.5 Manajemen Laba

### 2.5.1 Pengertian Manajemen Laba

Davidson, at al dalam buku H. Srisulistyanto mengemukakan bahwa:

*“Earnings management is the process of taking deliberate steps within the constrains of generally accepted accounting principles to bring about desired level of reported earnings (Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat laba yang diinginkan dari laba yang dilaporkan)”*.<sup>10</sup>

*National Association of Certified Fraud Exsaminers* mengemukakan, manajemen laba merupakan kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta material atau data akuntansi sehingga

<sup>9</sup> Sukrisno Agoes dan Ceni, **Etika Bisnis dan Profesi**, Salemba Empat, Jakarta, 2009.

<sup>10</sup> H. Srisulistyanto, **Op.Cit**, hal. 49

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.

Healy dan Wahlen dalam buku H. Srisulistyanto mengemukakan bahwa:

***“Earning management occurs when managers uses judgement in financial reporting and in instructing transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about underlying economics performance of the company or to influence contractual outcomes that depend on the reported accounting numbers (Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu)”.***<sup>11</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen laba (*Earning management*) merupakan campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal suatu perusahaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

### **2.5.2 Motivasi Dalam Manajemen Laba**

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba (*earnings management*), antara lain sebagai berikut:

#### **1. Motivasi Bonus**

Motivasi bonus adalah salah satu dorongan bagi para manager dalam melaporkan laba perusahaan dimana manajer akan berusaha untuk mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonusnya, jika perusahaan tersebut mempunyai kebijakan dalam pencapaian laba tertentu.

---

<sup>11</sup> H. Srisulistyanto, **Op.Cit**,hal. 50

Sri Sulistyanto mengemukakan :

**“Jika laba lebih rendah daripada target yang ditetapkan maka akan mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dengan mentransfer laba masa depan menjadi masa sekarang dengan harapan akan memperoleh bonus”.**<sup>12</sup>

## 2. Motivasi Kontrak

Hal ini berkaitan dengan hutang jangka panjang, dimana manajer akan menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default*. Hamonangan mengatakan **“Batasan-batasan yang termuat dalam kontrak kredit ini merupakan hal yang menakutkan bagi manajemen”**.<sup>13</sup> Oleh karena itu, kondisi keuanganlah yang menyebabkan perusahaan yang berada pada posisi nyaris melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati dapat menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka meminimalkan profitabilitas pelanggaran perjanjian kredit.

## 3. Motivasi Politik

Andreani dan Yosephine mengemukakan bahwa:

**“Motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah”.**<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 88

<sup>13</sup> Hamonangan, *Op.Cit*, hal. 276

<sup>14</sup> Andreani dan Yosephine, **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Manajemen Laba di Seputar *Right Issue***, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil hal. 2

Aspek politik ini sangat berpengaruh dan tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, terutama pada perusahaan besar dan industri yang menguasai hajat hidup orang banyak.

#### 4. Motivasi Pajak

Motivasi lain dalam melakukan manajemen laba yaitu usaha untuk meminimalkan beban pajak. Setiadi Alim menyatakan **“Dalam hal ini manajemen akan berusaha untuk menggeser laba dari suatu tahun ke tahun berikutnya agar diperoleh pembayaran pajak yang paling minimal”**.<sup>15</sup> Dimana pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan.

#### 5. Pergantian CEO (*Chief Executive Officer*)

Banyak motivasi yang timbul yang berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil dalam memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO yang sebelumnya. Natasya dan Wida mengemukakan **“Oleh karena itu, banyak dari CEO perusahaan yang menggunakan segala cara untuk**

---

<sup>15</sup> Setiadi Alim, **Manajemen Laba Dengan Motivasi Pajak Pada Badan Usaha Manufaktur Di Indonesia**, Jurnal Keuangan dan Perbankan hal. 4

**mempertahankan posisi jabatannya”.**<sup>16</sup> termasuk melakukan manajemen laba.

#### 6. Penawaran Saham Perdana (IPO)

Manajer perusahaan yang telah *go public* melakukan manajemen laba dengan tujuan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba yang dilakukan sebagai sinyal dari nilai perusahaan.

H. Srisulistyanto mengemukakan bahwa :

**“Manajer akan menyembunyikan, menunda, atau mengubah informasi yang dapat membuat investor mempunyai perspektif negatif terhadap perusahaan sebab hal ini akan mengakibatkan harga saham perusahaan jatuh”.**<sup>17</sup>

Karena semakin bagus informasi yang dipublikasikan perusahaan maka semakin bagus pula harga saham perusahaan, atau sebaliknya semakin buruk informasi yang dipublikasikan perusahaan maka semakin buruk pula harga sahamnya. Oleh karena itu, perusahaan cenderung menginformasikan hal-hal yang positif agar investor juga secara positif merespon saham yang ditawarkan perusahaan.

#### 7. Motivasi Pasar Modal

Manajemen laba dengan motivasi pasar modal banyak disebabkan oleh adanya anggapan umum bahwa angka-angka akuntansi, contohnya laba

---

<sup>16</sup> Natsya dan Wida, **Pergantian CEO, Penghindaran Pajak , Kompensasi Eksekutif dan Manajemen Laba**, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Universitas Syiah Kuala hal. 89

<sup>17</sup> H.Srisulistyanto, **Op.Cit**, hal. 72

merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan oleh investor untuk menilai harga saham. Maka tidak heran jika manajer berusaha membuat laporan keuangan menjadi lebih baik, dengan tujuan untuk mempengaruhi kinerja saham dalam jangka pendek. Menurut H. Srisulistyanto **“Hal ini dilakukan dengan menyembunyikan, menunda pengungkapan, atau mengubah informasi fundamental menjadi informasi palsu pada saat perusahaan akan melakukan suatu transaksi tertentu”**.<sup>18</sup>

### 2.5.3 Pola Manajemen Laba

Pola manajemen laba dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni:

#### 1. *Taking a Bath*

*Taking a bath* merupakan pola manajemen yang dilakukan dengan menetapkan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat rendah (rugi) atau sangat tinggi dibandingkan dengan laba periode sebelumnya atau sesudahnya. Menurut Hamonangan **“Apabila suatu perusahaan harus melaporkan suatu kerugian, maka manajemen merasa lebih baik atau sekaligus melaporkan kerugian yang besar”**.<sup>19</sup> Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi. *Taking a bath* terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru.

<sup>18</sup> **Ibid.**, hal. 68

<sup>19</sup> Hamonangan, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama, Medan: LPPM UHN Press, 2020, hal. 285

## 2. *Income Minimazation*

*Income minimazation* biasanya dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis maka dapat diatasi dengan cara mengambil laba periode sebelumnya. Menurut Hamonangan **“Pola *income minimization* dipilih untuk menghindari pengawasan perusahaan secara politik ketika perusahaan dalam periode profitabilitas yang tinggi”**.<sup>20</sup>

## 3. *Income Maximization*

Hamonangan mengemukakan bahwa **“Manajemen akan menggunakan metode ini apabila manajemen ingin mendapatkan bonus, sehingga cenderung melakukan maksimalisasi laba”**.<sup>21</sup> Pola ini biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. *Income maximization* dilakukan pada saat laba menurun, tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

## 4. *Income Smoothing*

Hamonangan berpendapat bahwa:

**“Perataan laba sebagai suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi viriabilitas varian angka laba yang dilaporkan relatif terhadap aliran yang merupakan target manajemen dengan**

---

<sup>20</sup> Hamonangan, **Loc.Cit**

<sup>21</sup> Hamonangan, **Op.Cit**, Hal. 285

**memanipulasi variable artivisial (akuntansi) atau variable riil (transaksional)”.**<sup>22</sup>

*Income smoothing* dilakukan oleh perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena para investor lebih menyukai perusahaan yang labanya relatif stabil.

Brayshaw dan Eldin berpendapat dalam buku hamonangan, ada dua alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba yakni:

- 1. Skema kompensasi manajemen biasanya dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang digambarkan melalui laba yang dilaporkan. Oleh sebab itu variabilitas dalam laba ini akan mempengaruhi manajemen secara langsung melalui kompensasinya.**
- 2. Ancaman pemindahan atau mutasi manajemen, variasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik untuk memindahkan manajemen, seperti penggabungan manajemen, perputaran manajemen, atau perpindahan manajemen secara langsung.**<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> **Ibid**, hal. 283

<sup>23</sup> Hamonangan, **Op.Cit**, hal. 284

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rancangan bentuk atau model suatu penelitian. Keberhasilan seorang peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya sangat dipengaruhi oleh desain penelitian yang dipilih. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Menurut Eden Sitompul et.al **“Penelitian kepustakaan merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan membaca buku-buku referensi atau hasil-hasil sebelumnya”**.<sup>24</sup>

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kualitatif yang desainnya bersifat umum dan berubah-ubah sesuai dengan situasi lapangan. Metode ini berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan oleh peneliti sebelumnya. Desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global tidak terperinci, tidak pasti dan sangan fleksibel.

#### **3.2 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa jurnal-jurnal dan penelitian yang sudah ada. Karena penelitian ini termasuk dalam jenis studi literatur seperti yang telah dipaparkan diatas. Dengan demikian aspek-aspek yang peneliti analisis

---

<sup>24</sup> Eden Sitompul, et.al, **Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi** (Penulisan Karya Ilmiah), Universitas HKBP Nommensen, hal. 111

berupa jurnal-jurnal dan penelitian yang sudah ada yang relevan dengan pembahasan topik penelitian.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pengumpulan data, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Elvis Purba **“Data sekunder adalah data yang telah ada atau data yang telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga”**.<sup>25</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dengan menggunakan studi pustaka dengan tujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perputakaan.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang serupa akan dihimpun data-data utama dan sekaligus dengan tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan dengan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi kepustakaan. Menurut Eden Sitompul **“Dalam rangkai pengumpulan data melalui penelitian pustaka ini, penulis perlu memperhatikan buku-buku atau hasil penelitian sebagai bahan**

---

<sup>25</sup> Elvis F Purba, **Metode Penelitian**, Universitas HKBP Nommensen Medan, 2012, hal. 107

**bacaan”.**<sup>26</sup> Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan dampak karakteristik dewan komisaris dan komite audit atas manajemen laba. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang mendukung terhadap penelitian yang berupa jurnal-jurnal atau hasil penelitian yang sudah ada untuk memberikan gambaran bagaimana dampak dari karakteristik dewan komisaris dan komite audit atas manajemen laba. Studi literatur dilakukan dengan cara membandingkan dan memahami buku-buku, jurnal-jurnal serta penelitian yang sudah ada yang relevan dan mendukung tentang dampak dari karakteristik dewan komisaris dan komite audit atas manajemen laba.

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti buku-buku, dan majalah. Juga dibantu dengan material yang berasal dari e-book, journal, dan artikel ilmiah.

---

<sup>26</sup> Eden Sitompul, et.al, **Op.Cit.** Hal. 112